

PROSIDING



3.0 | 2019



STIA LAN
BANDUNG

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Tantangan Administrasi dalam
Mewujudkan SDGs di Era Revolusi Industri 4.0

**Konferensi ke-3
16 Oktober 2019**



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG



stialanbandung.ac.id



[stialan_bandung](https://www.instagram.com/stialan_bandung)



[humas.stialanbdg](https://www.facebook.com/humas.stialanbdg)



[stialan_bdg](https://twitter.com/stialan_bdg)



3.0 | 2019

**KONFERENSI NASIONAL
ILMU ADMINISTRASI**



**STIA LAN
BANDUNG**

Proceeding

Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 3.0

(KNIA 3.0- 2019)

"Tantangan Administrasi dalam Mewujudkan SDGs di Era Revolusi Industri 4.0"

16 Oktober 2019

Bandung, Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi - Lembaga Administrasi Negara

Bandung

(Penerbit STIA LAN Bandung)

Jalan Hayamwuruk 34 - 38 Bandung

Tel: (022) 4237375

Email: info@stialanbandung.ac.id

Website: <http://www.stialanbandung.ac.id/>

Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, pencatatan, atau metode elektronik atau mekanis lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemilik hak cipta dan penerbit.

ISBN 978-602-5718-43-4

Copyright © 2019 Belong to the Writers

3th KNIA © 2019 STIA LAN Bandung. All rights reserved.



3.0 | 2019

KONFERENSI NASIONAL
ILMU ADMINISTRASI



STIA LAN
BANDUNG

Koordinator Program

Dr. Abdul Rahman, S.K.M., M.Si.

Sekretaris

Ati Rahmawati, S.I.P, M.E.

Dewan Editor Konferensi

Prof. Dr. Deddy Mulyadi, M.Si.

Prof. Dr. Endang Wirjatmi TL., M.Si

Dr. Ir. Ely Sufianti, MA.

Dr. R. Sutarto Mochtar, MA., M.Si.

Arundina Pratiwi, Ph.D.

Dra. F. Laksmi Fitriani, M.M.

Dinoroy Aritonang, S.H., M.H.

Dr. Nita Nurliawati, S.Sos., M.Si.

Lidia Maasir, B. Comm.Hons, M.H.R.M.

Dr. Joni Dawud, D.E.A.

Dr. Edah Jubaedah, MA.

Dra. Tetty Kurniati, M.Ed., Adm.

Drs. Wahyu Gia Uliantoro, M.T.

Dr. Hendrikus T. Gedeona, S.I.P., M.Si.

Ono Taryono, S.Pd., M.A.

Dr. Teni Listiani, S.E., M.M.

Dr. Nefi Aris Ambar Asmara, MA.

Administrator Konferensi

Ir. Budi Setiawan, M.MT.

Drs. Sabar Gunawan, MA.

Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

Dr. Sait Abdullah, S.Sos.,M.Pol.Adm.

Dr. Hafid Aditya Pradesa, SE., MM.

Endah Mustika Ramdani, S.IP., M.AP.

Deni Fauzi Ramdani, S.Sos., MA.

Pepi Zulvia, S.Pd., M.Si.

Endah Tri Anomsari, S.Sos., M.Sc

Riky Rinaldy Maulana, S.IP., M.AP

Alikha Novira, S.Hum., M.I.Pol

Adhika Bergi Nugroho, ST., M.A.B

Anggi Syahadat Harahap, ST., M.Kom

Nisha Faradilla Sofiani, ST, MT

Cintantya Andhita Dara Kirana, S.AP., M.AP

Fandi Ahmad, ST., MT

Heny Handayani, S.Hum., MM

Iwan Kurniawan, S.Pd., M.Si

Metha Djuwita Supriatna, S.Si., MM

Nur Imam Taufik, S.IP., MM

Reni Wijayanti, S.Si., M.A.B

Rike Anggun Artisa, S.I.P., MPA

Rofi' Ramadhona Iyoega, SP., M.Sos

Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, S.IP., M.AP

Susi Susanti Tindaon, S.Pd., M.B.A

Siti Widharetno Mursalim, S.IP., M.Si



3.0 | 2019

**KONFERENSI NASIONAL
ILMU ADMINISTRASI**



**STIA LAN
BANDUNG**

Asisten Program Konferensi

Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H.
Fikri Aditya Tri Andikaputra, S.Kom
Ricky Adi Putranto, S.E., M.M.
Melati Dewi Asri, S.Pd., M.E.
Ika Wulandari, S.Sos., M.Ikom.
Dessy Deliana Puspasari, S.Sos.
Hanifah Fauziyyah, S.M
Frida Novianty, A.Md.
Yukiko Irelli Putri, S.IIP
Rahman Widiyanto, S.IP.
Opik Idham Taufik.
Dyah Marina Kusuma Dewi, S.Sos.
Katharina Rahayu Candrawati, ST.
Ervina
Firda

**Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi - Lembaga Administrasi Negara
Bandung**

(Penerbit STIA LAN Bandung)

Jalan Hayamwuruk 34 - 38 Bandung

Tel: (022) 4237375

Email: info@stialanbandung.ac.id

Website: <http://www.stialanbandung.ac.id/>

Copyright © 2019 Belong to the Writers
3th KNIA © 2019 STIA LAN Bandung. All rights reserved.



3.0 | 2019

KONFERENSI NASIONAL
ILMU ADMINISTRASI



STIA LAN
BANDUNG

LAPORAN KEGIATAN
KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI DI STIA LAN BANDUNG (KNIA) 3.0

Oleh:
KETUA STIA LAN BANDUNG
Bandung, 16 Oktober 2019

- Yth. Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA, Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN RI
- Yth. Bapak H. Yana Mulyana, SE, Wakil Walikota Bandung
- Yth. Bapak Leonardo Adypurnomo Alias Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D., Direktur Industri, Pariwisata, dan Industri Kreatif BAPPENAS
- Yth. Bapak Ir. H. Tatan Pria Sudjana, SE., Ketua Kadin Jawa Barat atau yang mewakili
- Yth. Seluruh peserta Konferensi Ilmu Administrasi, yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan anugerah karunia nikmat kepada kita semua, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dapat mengikuti kegiatan konferensi nasional ilmu administrasi di STIA LAN Bandung yang Ke-3. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini sudah selayaknya kita ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua pada hari ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami merasa bangga dan terima kasih kepada bapak Kepala LAN RI, dapat hadir dan mendukung penuh dalam acara kegiatan ilmiah ini, yang merupakan sebagai bagian dari kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Hadirin yang saya Hormati,

Ijinkan kami akan menyampaikan laporan kegiatan konferensi nasional ilmu administrasi ke-3 di STIA LAN Bandung. Tahun ini tema KNIA 3.0 adalah "Tantangan Administrasi dalam Mewujudkan SDGs di Era Revolusi Industri 4.0", di mana kegiatan ini dibagi atas 2 (dua) sesi kegiatan, yaitu: sesi pertama merupakan kegiatan penyampaian materi utama (keynote speech) dan materi secara panel yang dilanjutkan dengan diskusi, dan sesi kedua adalah presentasi paralel yang akan dilakukan oleh masing-masing pemakalah.



Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini diikuti sebanyak 172 orang peserta yang pendaftarannya melalui online, yang terbagi atas 128 orang sebagai pemakalah dan 44 orang sebagai peserta konferensi nasional. Adapun peserta berasal dari institusi perguruan tinggi antara lain: ITB, UI, UNPAD, Universitas Andalas, UNDIP, UNBRAW, UNSRI, UNILA, UNJ, Telkom University, IPDN, dan perguruan tinggi lainnya. Kemudian Unit kerja di Lingkungan LAN RI, Pemerintah Pusat seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah antara lain: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kota Bandung.

Hadirin yang saya Hormati,

Terselenggaranya kegiatan ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah berpartisipasi, sehingga acara ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN RI, narasumber, peserta dan seluruh panitia penyelenggara kegiatan ini.

Demikianlah laporan kegiatan Konferensi Nasional Ilmu Administrasi Ke-3 yang diselenggarakan oleh STIA LAN Bandung, semoga kegiatan ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahitaufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bandung, 16 Oktober 2019
Ketua STIA LAN Bandung

Dr. Joni Dawud, D.E.A



3.0 | 2019

KONFERENSI NASIONAL
ILMU ADMINISTRASI



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas segala rahmat, dan hidayah dari Allah SWT, Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Tahun 2019 telah selesai disusun. Prosiding ini sangat berguna dalam rangka untuk meningkatkan budaya literasi dan juga bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk meningkatkan kualitas Dosen di lingkungan STIA LAN Bandung.

Prosiding ini membahas tema “Tantangan Administrasi dalam Mewujudkan SDGs di Era Revolusi Industri 4.0”. Semoga hasil prosiding ini dapat memberikan masukan yang berharga kepada para praktisi, akademisi dan aparatur daerah dalam meningkatkan pengetahuan.

Akhirnya, kami menyadari masih banyak kekurangan dari proses awal sampai akhir penyusunan prosiding ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian prosiding ini. Semoga hasil prosiding ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 16 Oktober 2019



Daftar Isi

Daftar Isi

LAPORAN KEGIATAN	v
KATA PENGANTAR	vii
Daftar Isi	viii
1. Pemerintahan Umum di Indonesia: Meninjau Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.....	1
2. Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur pada Daerah Otonom melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Studi pada Pemerintah Kota Bandung)	8
3. Efektivitas Sistem Aplikasi Aduan <i>Online Bebeja</i> Sebagai Sarana Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang	16
4. Kajian Pengembangan Sumberdaya Aparatur Daerah Pemekaran Di Pangandaran Jawa Barat	22
5. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Parawisata Danau Singkarak Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	28
6. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Teknis Berbasis E-Learning (Study Kasus Penyelenggaraan <i>Management Of Training</i>).....	34
7. Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palu dalam Riset dan Inovasi Pembangunan Daya Saing Daerah	41
8. Tantangan Dalam Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas.....	53
9. Optimalisasi Eksplorasi Potensi Desa Berbasis <i>Community Development</i> di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang	60
10. <i>Dynamic Governance</i> Dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Serang	79
11. Literasi Budaya Dalam Keluarga Pada Masyarakat Sekitar Candi Batujaya: Perspektif Sosial Ekonomi.....	103
12. <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Kohod	114
13. Strategi Pengembangan Program D-IV Prodi MSDM Aparatur STIA LAN Jakarta Menghadapi Revolusi Industri 4.0.....	121
14. Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi	127
15. Analisis Pelaksanaan Seleksi Terbuka bagi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia.....	133



16. Belanja Publik dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Sulawesi Barat...	139
17. Studi Kasus Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Arsip Pada Kantor Konsultan Pajak Jakarta.....	144
18. “Keluar dari Kutukan Sumber Daya Alam” Studi Kebijakan Tata Kelola Industri Ekstraktif di Kab. Bojonegoro.....	148
19. Pengentasan Kemiskinan melalui E-Government.....	169
20. Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Melalui Waqaf Untuk Kemajuan Umkm Dan Pertumbuhan Ekonomi.....	179
21. Pemanfaatan E-SKA sebagai Peluang Perluasan Akses Pasar Ekspor ke Chile.....	184
22. Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai Administrasi pada Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung.....	191
23. Pertumbuhan Pengguna Internet dan Kemajuan Indonesia.....	196
24. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Situs Melandang Didessa Buah Dua Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang.....	202
25. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kantor Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.....	205
26. Analisis Pengelolaan Pasar Semi Modern di Kabupaten Sumedang.....	211
27. Faktor Penghambat Implementasi Perda Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kantor Di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang.....	215
28. Analisis Motivasi Mahasiswa Semester VII STIA Sebelas April Sumedang pada Program Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa.....	219
29. Pengembangan Umkm “Opak Citaleus” Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat Desa Citaleus Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.....	225
30. Efektivitas Kerja Pegawai Di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.....	231
31. Analisis Pemanfaatan TI di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.....	236
32. Penerapan COSO, GCG di Perusahaan Berbasis Teknologi Informasi untuk Kinerja Operasional, Kinerja Keuangan Berkualitas.....	245
33. Tantangan Peningkatan Kualitas Hidup ditengah Terbatasnya Pola Pikir Masyarakat di Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua.....	252
34. Analisis Koordinasi Antar Bidang di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang.....	257
35. Patologi Demokrasi di Indonesia.....	261
36. Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mekarmukti Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang.....	265
37. Gender dan Ideologi Maskulinitas pada periode Pasca MOU Helsinki Aceh.....	282
38. Analisis SWOT Tahu Cinta Rasa Dalam Upaya Pengembangan Industri Makanan di Kabupaten Sumedang.....	290



39. Pengaruh Inovasi Media Internet Terhadap Perilaku Sosial Insruktur Pusdiklat LPP TVRI dan Mahasiswa Praktek Di Pusdiklat Lpp Tvri, Dalam Mewujudkan SDGS Di Era Revolusi Industri 4.0	303
40. Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM.....	309
41. Pemberdayaan Pemerintah Dalam Pelestarian Lokal Desa Cibitung Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang	316
42. Analisis Tata Ruang Kantor di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.....	321
43. Analisis Iklim Komunikasi Organisasi (Studi Kasus Pada Desa Bojongloa)	326
44. Analisis Perilaku Sosial Masyarakat Pada Rencana Pembangunan Infrastruktur Di Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Sumedang	331
45. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	341
46. Analisis Iklim Organisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Dinas Kabupaten Sumedang	346
47. Kualifikasi Sekretaris Top Manajemen pada Perusahaan Telekomunikasi	356
48. <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri.....	362
49. Kontribusi Inovasi Produk Terhadap Peningkatan Keputusan Pembelian.....	368
50. Pendekatan <i>Knowledge Community</i> Dalam Pemetaan Sosial Jejaring Kelembagaan Desa	375
51. Wisata Halal Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	380
52. Pengawasan Kebijakan APBK Aceh Utara Tahun 2018.....	388
53. Inovasi Dan Pelayanan Publik.....	396
54. Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Daerah Terpencil Di Tulungagung	402
55. Pemodelan Data Center untuk Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis TIK di Pemerintah Kota Bandung	408
56. Kekerasan Pola Asuh Anak Dalam Kajian Teori <i>The Integrated Cognitive Antisocial Potential</i> (ICAP).....	416
57. Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah.....	430
58. Pemanfaatan Aplikasi Manajemen Tugas Berbasis Sistem Komputasi Awan (Cloud Computing System) di Kementerian Perdagangan.....	437
59. Pengaruh Pelatihan dan Pembimbingan Ekspor terhadap Keberhasilan Ekspor Pelaku Usaha Kecil dan Menengah	443
60. Kesiapan Indonesia Menuju <i>Agile Governance</i>	448
61. Manusia Sebagai Agen Perubahan (Studi Perilaku Perajin Batik Tulis di Lasem, Jawa Tengah)	454



62. Desentralisasi dan Kompleksitas Masalah Demokrasi Lokal	461
63. 152 Educational Mismatch dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia	467
64. Pengembangan Wilayah Kota Kekecamatan Maja Di Provinsi Banten	481
65. Pengaruh Manajemen Diklat Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Biro Kepegawaian SETJEN KEMHAN.....	486
66. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Gramedia Asri Media Palmerah Barat.....	493
67. Penguatan Hubungan Kelembagaan Desa di Kabupaten Garut (Studi Tentang Manajemen Bencana)	501
68. Peranan Unit Kerja Dalam Pengembangan Kompetensi Pejabat Analis Kebijakan di Lembaga Administrasi Negara.....	509
69. <i>Collaborative Governance</i> Dalam Menciptakan Kewirausahaan Desa Dilihat Dari Aspek Stake Holder Non State	517
70. Tantangan Pengelolaan Sistem Informasi Geografis di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Perwujudan Transportasi Hijau	522
71. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi DKI Jakarta	528
72. Harapan Kebijakan Perpindahan Ibukota Kabupaten Sukabumi.....	534
73. Analisis Penerapan Manajemen Resiko dalam Mewujudkan Visi Strategis di Kabupaten Bandung Barat	541
74. Mewujudkan Daerah Tangguh Bencana Melalui Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Resiko.....	548
75. Solusi Transformasional Kemiskinan di Indonesia	555
76. Menghindari Pseudo Nagari: Desentralisasi Dalam Bingkai Intervensi Negara Di Sumatera Barat.....	561
77. Peran Kompetensi Pegawai Dalam Pengendalian Internal Persediaan Bahan Habis Pakai Di Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri Kota Bandung.....	567
78. Usulan Penerapan 5s Pada Bagian Kepegawaian Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja.....	572
79. Model Pengembangan Inovasi Berbasis Pola Fikir Dan Komitmen Pejabat Publik ...	575
80. Model Media Sosial di Sektor Publik Studi Literatur.....	581
81. Hambatan Perempuan Dalam Mengembangkan Kegiatan Usaha Melalui Sektor UMKM di Kabupaten Bantul.....	588
82. Peran Komite Sekolah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Mencapai Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> di Indonesia.....	594
83. Netizen sebagai Basis Citizen Power dalam Mengawasi Mutu Pelayanan Publik....	602
84. Kesiapan Implementasi Penanganan Kemacetan Melalui Inovasi Bisnis Cakep Lalu Lintas Lancar (BCL) di Kota Pontianak.....	607



85. Model-model Alternatif Penyediaan Layanan Publik yang Berkualitas.....	613
86. Penerapan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Desa	619
87. Landscape E-Money di Indonesia.....	623
88. Model Implementasi Penyerapan Anggaran dan Pengembangan Kapasitas Pada Kabupaten Subang dan Sumedang.....	627
89. Tantangan Revitalisasi Sungai Citarum dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Citarum Harum	631
90. Pandangan Mahasiswa Mengenai E-Ktp	635
91. Perspektif Analisis Stakeholder Pada Perguruan Tinggi : Sebuah Pengalaman Praktis Dari Literatur Terdahulu.....	639
92. Membangun Keterikatan Mahasiswa Milenial Dalam Aktivitas Pembelajaran di Perguruan Tinggi.....	644
93. Pembinaan Pelatihan Tentang Teknologi Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Citaleus Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang	649
94. Pengelolaan Wisata Situ Biru Cilembang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Hariang Kecamatan Buahdua.....	654
95. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Aset Wisata Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.....	659
96. 228 Work Life Balance (WLB) melalui Penerapan Aplikasi Kerja Berbasis IT pada Pegawai Wanita	664
97. 230 Evaluasi Etos Kerja Pegawai Negeri Sipil Mantan Rehabilitasi Narkoba di Pemerintahan Kota Binjai.....	671
98. Pola Karier Berbasis Kompetensi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.....	677
99. Evaluasi dan Model Operasional Pengendalian dan Penanganan Prostitusi di Kabupaten Cianjur	685
100. Evaluasi Implementasi Kebijakan dan Model Alternatif Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli	692

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama pada Kawasan Wisata Bahari dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

¹Teuku Fahmi, ²Dewi Ayu Hidayati, ³Yulianto, ⁴Selvi Diana Meilinda,
⁵Astiwi Inayah

¹²Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

³⁴Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

⁵Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung

e-mail : ¹teuku.fahmi@fisip.unila.ac.id, ²dewiayu.hidayati@fisip.unila.ac.id,

³yulianto@fisip.unila.ac.id, ⁴selvi.meilinda@fisip.unila.ac.id,

⁵astiwi.inayah@fisip.unila.ac.id,

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pengembangan usaha BUMDes Bersama pada kawasan wisata bahari di Pekon Kiluan Negeri dan Pekon Negeri Kelumbayan, Kec. Kelumbayan, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilakukan berbentuk pemetaan keberadaan BUMDes di tiap pekon dan dilakukannya pelatihan yang dibarengi dengan pendampingan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam dua sesi, adapun peserta yang terlibat dalam sesi pertama sebanyak 29 orang dan pada sesi kedua sebanyak 35 orang. Keseluruhan peserta dalam kegiatan PkM ini merupakan masyarakat di Pekon Kiluan Negeri dan Pekon Negeri Kelumbayan termasuk didalamnya para pengelola BUMDes. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini diantaranya: tahap peningkatan aspek kognitif, tahap pendampingan dan pemberdayaan, serta tahap advokasi. Secara khusus kegiatan pengabdian ini mengarah pada beberapa capaian tujuan diantaranya: aspek kognitif, terjadi peningkatan pemahaman tentang keberadaan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa menjadi lebih besar dan kuat. Kegiatan pengabdian yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta sebesar 12,50%. Pada aspek praktis, munculnya inisiasi pengembangan BUMDes Bersama di Pekon Kiluan Negeri dan Pekon Negeri Kelumbayan. Namun demikian, inisiasi tersebut dalam satu tahun kedepan belum dapat direalisasikan oleh karena BUMDes yang ada di Pekon Negeri Kelumbayan masih perlu dilegal formalkan secara administratif.

Kata Kunci: BUMDes; wisata bahari; kesejahteraan; masyarakat pesisir



3.0 | 2019



STIA LAN
BANDUNG

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

The Development of joint Village-Owned Enterprises (BUMDes Bersama) in the Marine Tourism Area to Improve the Welfare of Coastal Communities

Abstract

These community service activities are focused on developing BUMDes business in the marine tourism area in Pekon Kiluan Negeri and Pekon Negeri Kelumbayan, Kelumbayan, Tanggamus, Lampung . The activities were held in the form of mapping the presence of BUMDes in each pekon and conducting training accompanied by assistance. The main purposes of the activities were carried out in two sessions, the participants involved in the first session were 29 people and in the second session were 35 people. All participants in these community service activities are the people who live in Pekon Kiluan Negeri and Pekon Kelumbayan State, including the BUMDes managers. The methods used in this activity include: the stage of improving cognitive aspects, the stage of assistance and empowerment, as well as the advocacy stage. Specifically, these community service activities aim at achieving several objectives including: cognitive aspects, an increase for understanding the existence of BUMDes to improve the village's economy aspect to become bigger and stronger. These community service activities have succeeded to increase the knowledge and understanding of the participants by 12.50%. In the practical aspect, the emergence of the initiation of joint development between BUMDes in Pekon Kiluan Negeri and Pekon Negeri Kelumbayan. However, the initiation cannot be realized for a year ahead because the BUMDes in Pekon Negeri Kelumbayan still needs to be formalized administratively.

Keywords: *BUMDes; marine tourism; welfare; coastal communities*

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya saat ini menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut hal ini berarti bahwa pemerintah Indonesia memberikan kekuasaan dan kesempatan kepada setiap daerah otonom untuk menjalankan otonomi daerahnya masing-masing guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Jurnaidi, Djumadi, dan Paranoan, 2015).

Sejak digulirkannya UU Desa (2014), kebijakan terkait pembangunan desa telah menjadi isu penting dan arus utama (*mainstreaming*) pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa penerapan kebijakan pembangunan terpusat pada desa memiliki arti bahwa desa berkewenangan dalam menjalankan pembangunan dan berkewajiban untuk pembangunan di desanya sendiri. Pembangunan disini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik namun juga pembangunan secara sosial seperti pemberdayaan masyarakat desa. Muara dari itu semua, sejatinya desa dapat menjadi "*self governing community*" yang maju, kuat, mandiri dan demokratis (Kurniawan, 2015).

Namun pada kenyataannya, identitas desa di Indonesia tidak terlepas dari beragam polemik semisal: sebagai kawasan yang tertinggal, terpinggirkan, erat kaitannya dengan kemiskinan, dsb. Oleh karenanya, pemerintahan saat ini cukup konsern untuk mengembalikan "marwah" desa dengan mengedepankan pembangunan di wilayah perdesaan. Lebih lanjut, pandangan pemerintah saat ini juga cukup optimis dengan menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia sebagai pusat perekonomian yang menyejahterakan (Hayu, 2015). Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2014, dikeluarkanlah kebijakan baru yaitu Dana Desa (DD). Kebijakan DD ini di atur dalam PP 22/2015 perubahan dari pasal 14, pasal 18, pasal 23, dan pasal 28 dalam PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.

Terkait dengan alokasi penggunaan Dana Desa (DD), salah satu komponen didalamnya diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk lingkup peningkatan aspek ekonomi masyarakat, desa diharapkan mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Usaha skala lokal desa yang dijalankan BUMDes mulai tumbuh pasca UU No. 6/2014 tentang Desa dijalankan. Selain BUMDes yang tumbuh pada skala lokal desa, UU Desa juga memberikan ruang dan kesempatan kepada 2 (dua) Desa atau lebih menjalin kerjasama, termasuk membangun "BUMDes Bersama". Adapun pembentukan BUMDes Bersama sebagai landasan perluasan ekonomi Desa di zona perdesaan (dua desa atau lebih) hingga saat ini masih menghadapi beragam kendala. Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (2017) menguraikan kendalanya ialah ketidakpahaman para pihak akan BUMDes Bersama mulai dari regulasi hingga pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), hingga dukungan Desa dan pemerintah supradesa.

Kajian mengenai keberadaan BUMDes yang langsung/tidak langsung berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Ridlwan (2014) mengungkapkan bahwa kegiatan BUMDes menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Kajian lainnya juga menyebutkan jika pengembangan BUMDes dapat dilakukan dengan mengoptimalkan implementasi dana desa (Nugrahaningsih, Falikhatun, dan Winarna, 2016).

Meskipun demikian, Nugrahaningsih, Falikhatun, dan Winarna (2016) menemukan beberapa kendala yang menjadikan BUMDes tidak berjalan secara optimal. Kendala tersebut diantaranya:

1. Perbedaan paradigma dari stakeholder terkait dengan pengelolaan Dana Desa,
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi program kerja BUMDes, dan
3. Kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan rencana kerja dan laporan keuangan BUMDes.

Pada aspek ini diperlukan tata kelola yang profesional dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDes berdasarkan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

peraturan berlaku. Selain itu, pemerintah desa perlu memahami lebih lanjut tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah (Purnamasari, Yulyana, dan Ramdani, 2016).

Terkait dengan pengembangan kawasan wisata bahari, Kawasan Teluk Kiluan berada di Pekon Kiluan Negeri, Kec. Kelumbayan, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung. Area pesisir Teluk Lampung ini menyimpan begitu banyak potensi keindahan alam yang cukup terkenal hingga tingkat nasional, khususnya sebagai salah satu kawasan habitat Lumba-Lumba. Dengan potensi wisata alam bahari yang mempesona, Pekon Kiluan Negeri gencar dilakukan pengembangan ekowisata pada wilayah tersebut.

Namun demikian, pengembangan kawasan wisata bahari di Pekon Kiluan Negeri juga tidak terlepas dari beragam kendala, baik fisik maupun nonfisik. Kendala fisik dapat ditengarai seperti keterbatasan sarana transportasi, penyediaan infrastruktur jalan, dsb. Adapun kendala nonfisik seperti aktivitas dari wisatawan dan masyarakat yang kurang menjaga lingkungan. Merujuk pada kajian yang dilakukan Sari dan Kagungan (2016), setidaknya terdapat 6 (enam) rekomendasi yang dapat dijadikan perhatian bersama dalam melakukan pengembangan pariwisata di Teluk Kiluan, diantaranya:

1. Perlu peningkatan koordinasi dan keterpaduan kebijakan dari program antar instansi terkait (*stakeholders*),
2. Memperkuat kelembagaan tingkat Desa/ Pekon berbasis kearifan lokal,
3. Perbaiki infrastruktur jalan menuju wilayah Teluk Kiluan dan melengkapi sarana prasarana vital lainnya,
4. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Daerah serta *stakeholders* lainnya,
5. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan pendampingan masyarakat secara

kontinyu (sosialisasi, pelatihan, dan sebagainya), dan

6. Penguatan kelembagaan desa berbasis kearifan lokal sebagai upaya untuk mendorong lembaga pekon/desa dalam memahami tugas dan fungsinya perlu dilakukan melalui pertemuan-pertemuan berkala dengan melibatkan semua komponen lembaga pekon/ desa dalam memajukan pekon/desa.

Pengembangan kawasan wisata bahari di Teluk Kiluan perlu dikolaborasikan dengan mengoptimalkan wadah BUMDes Bersama pada lokasi tersebut. Uraian pada latar belakang di atas, telah menggambarkan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pengembangan BUMDes Bersama. Untuk konteks ini, ruang lingkup kegiatan pengabdian yang dilakukan berfokus pada pengembangan usaha BUMDes Bersama pada kawasan wisata bahari.

B. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Musyawarah Antardesa dalam Upaya Inisiasi BUMDes Bersama

Pada kegiatan pengabdian ini, upaya untuk mengenali potensi wisata bahari dilakukan dengan melakukan eksplorasi secara langsung ke beberapa tempat wisata yang dianggap favorit untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Selain itu, teknik observasi langsung tersebut mampu memberikan gambaran lebih nyata, selain diperolehnya informasi pada saat wawancara dengan Kepala Pekon Kiluan Negeri, Bapak Kadek Sukresene.

Geliat kehidupan masyarakat pesisir tidak lepas dari kawasan Kiluan Negeri. Seperti pada kawasan pesisir lainnya di Provinsi Lampung, kondisi pesisir Kiluan Negeri tampak perlu perhatian khusus yang melibatkan banyak *stakeholders*, terkait dengan sarana & prasarana dan pengembangan SDM lokal.

Hasil eksplorasi tim menjadi bahan diskusi pada sesi musyawarah antardesa yang dilakukan di Balai Pekon Kiluan Negeri. Pada pengamatan sebelumnya, diketahui bahwa wilayah pesisir ke Kiluan Negeri memiliki titik (*spot*) pengolahan Ubur-Ubur yang merupakan bahan komoditas bahan kecantikan yang diekspor ke beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dsb.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI



Gambar 1. Pelaksanaan musyawarah antardesa dalam rangka inisiasi pembentukan BUMDes Bersama & Pemetaan Potensi Wisata Bahari di Teluk Kiluan

Terkait dengan pengembangan wisata pesisir di Kiluan Negeri, beberapa aspek perlu ditingkatkan baik dari aspek sarana prasarana maupun kemampuan SDM lokal dalam menemukan potensi wisata pada wilayah tersebut. Untuk konteks ini penerapan *Community Based Tourism* (CBT) dapat dijadikan alternatif pengembangan desa wisata pada wilayah pesisir ini. Meskipun demikian, sebagaimana yang dikemukakan Safi'i dan Suwandono (2015), lembaga/organisasi masyarakat desa memiliki peranan penting didalam perwujudan desa wisata.

Adapun terkait dengan pengembangan BUMDes yang kemudian diinisiasi menjadi BUMDes Bersama, perlu mengedepankan optimalisasi potensi desa yang berada di kawasan pesisir. Terkait dengan kendala pengembangan BUMDes, diperlukan waktu yang lebih panjang dan kolaborasi dengan pendamping desa dalam mengekspansi jenis usaha yang dijalankan dalam BUMDes tersebut.

Secara keseluruhan, terkait dengan pendirian BUMDes Bersama di wilayah pesisir Teluk Kiluan, hingga saat ini belum dimungkinkan mengingat beberapa kendala teknis yang ada di dua pekan tersebut. BUMDes di Pekon Kiluan Negeri sejauh ini belum melakukan kolaborasi dengan BUMDes di Pekon Negeri Kelumbayan dengan membentuk BUMDes Bersama. Hal ini disebabkan baru satu desa saja yang memiliki BUMDes yakni Pekon Kiluan Negeri, sedangkan Pekon Negeri Kelumbayan hingga saat ini masih melakukan inisiasi guna membentuk BUMDes.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan PkM

Pada kegiatan pengabdian ini evaluasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu evaluasi awal dan evaluasi akhir. Evaluasi awal dilaksanakan sebelum peserta mendapatkan materi pelatihan, sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pengetahuan para peserta sebelum pelatihan. Evaluasi awal dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan singkat sesuai dengan materi yang diberikan.

Evaluasi akhir dilaksanakan pada akhir kegiatan, setelah para peserta mengikuti semua materi yang diberikan. Evaluasi akhir dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang serupa dengan evaluasi awal, sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan/peningkatan pengetahuan para peserta tentang materi yang diberikan. Sedangkan evaluasi mengenai keterampilan peserta dilakukan berdasarkan hasil kerja kelompok dan pada saat presentasi. Adapun hasil evaluasi awal (*Pre Test*) dan evaluasi akhir (*Post Test*) dapat dilihat pada Tabel 1. Dalam hal ini, para peserta dimintakan penilaian/tanggapannya (skema/ model pertanyaan benar atau salah) pada lima pernyataan berikut:

1. Kaitan antara penyertaan modal BUMDes dengan APBDes,
2. Tujuan akhir dari pendirian BUMDes dikaitkan dengan perekonomian desa,
3. Potensi SDA di desa dapat menjadi pertimbangan dalam mendirikan BUMDes,
4. Teknis pendirian BUMDes dan peran aparatur pemerintah desa, dan
5. Teknis pendirian BUMDes yang harus dilegalformalkan melalui peraturan desa.

Tabel 1. Hasil Pre Test dan Post Test

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Kegiatan PkM

Kategori Hasil Perhitungan	Nilai Pre Test	Nilai Post Test
Min	20	40
Max	100	100
Modus	60	100
Median	60	80
Average	66.50	79
STDEV	21.903	19.716

Sumber: Olahan data primer

Pembahasan Hasil Evaluasi Kegiatan PkM

Setelah dilakukan pelatihan tentang pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama pada kawasan wisata bahari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di dua pekon yakni Kiluan Negeri dan Negeri Kelumbayan. Peserta yang mengikuti evaluasi awal dan akhir berjumlah 40 orang yang berasal dari dua pekon tersebut. Kegiatan pengabdian yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta sebesar 12,50%. Pada aspek praktis, munculnya inisiasi pengembangan BUMDes Bersama di Pekon Kiluan Negeri dan Pekon Negeri Kelumbayan. Mengacu pada hasil evaluasi awal dan akhir pada Tabel 1 di atas, dapat digambarkan beberapa hal berikut ini:

1. Rata-rata hitung (mean) hasil pretest sebesar 66.50 sedangkan pada hasil post test 79, berdasarkan statistik tersebut maka secara keseluruhan pelatihan yang dilakukan telah mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta dengan nilai rata-rata sebesar 12,5 persen.
2. Trend yang serupa juga terjadi pada ukuran pemusatan lainnya yakni modus dan median. Terlihat bahwa nilai modus pada hasil pre test berada pada angka 60 lalu untuk hasil post test secara signifikan melonjak berada pada angka 100. Sedangkan untuk nilai median, dari angka 60 menjadi angka 80. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kemampuan peserta pelatihan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian ini.
3. Perubahan nilai standar deviasi antara hasil pre test dengan post test, dari 21,903 menjadi 19,716, menunjukkan data hasil post test cenderung lebih homogen (variabilitas lebih rendah) dari data pre test. Hal ini makin mempertegas bahwa

kegiatan ini telah mampu memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada para peserta yang terlibat dalam kegiatan ini.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Secara khusus kegiatan pengabdian ini mengarah pada beberapa capaian tujuan diantaranya: aspek kognitif, terjadi peningkatan pemahaman tentang keberadaan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa menjadi lebih besar dan kuat. Kegiatan pengabdian yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta sebesar 12,50%. Pada aspek praktis, munculnya inisiasi pengembangan BUMDes Bersama di Pekon Kiluan Negeri dan Pekon Negeri Kelumbayan. Namun demikian, inisiasi tersebut dalam satu tahun kedepan belum dapat direalisasikan oleh karena BUMDes yang ada di Pekon Negeri Kelumbayan masih perlu dilegal formalkan secara administratif.

Rekomendasi

Mengacu hasil kesimpulan diatas, luaran rekomendasi yang ditindaklanjuti yakni diperlukannya kegiatan yang serupa agar dapat mencakup seluruh elemen masyarakat, baik mencakup dinas/instansi terkait ataupun mitra lokal yang mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjalankan BUMDes hingga melakukan kolaborasi agar mampu membentuk BUMDes Bersama. Lebih lanjut, kondisi pesisir Kiluan Negeri tampak perlu perhatian khusus yang melibatkan banyak stakeholders, terkait dengan sarana & prasarana dan pengembangan SDM lokal. Adapun terkait dengan pengembangan BUMDes yang kemudian diinisiasi menjadi BUMDes Bersama, nantinya, perlu mengedepankan optimalisasi potensi desa yang berada di kawasan pesisir berbasis kearifan lokal.

REFERENSI

- Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan. 2017. *Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa Bersama*. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Jakarta.

- Hayu, Pradani. 2015. *Dana Desa yang Adil dan Merata*. Media Keuangan. Volume X/No.93/ Juni 2015. 23-25.
- Jurnaidi., Djumadi., Pranoan, DB. 2015. *Faktor - Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Administrative Reform, 112-124.
- Kurniawan, B. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, & Winarna, J. 2016. *Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri*. Journal of Accounting and Business, 16 (1), 37-45.
- Purnamasari, H., Yulyana, E., & Ramdani, R. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang*. Jurnal Politikom Indonesiana, 1 (2), 31.
- Sari, Y. R., & Kagungan, D. 2016. *Pengentasan Kemiskinan Desa Pesisir Melalui Optimasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 18 (2).
- Syafi'i, M., & Suwandono, D. 2015. *Perencanaan desa wisata dengan pendekatan konsep community based tourism (CBT) di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak*. Ruang, 1 (2), p. 51-60.